

**PERAN INDONESIA TERHADAP KRISIS KEMANUSIAAN DI MYANMAR MELALUI  
KEBIJAKAN *CONSTRUCTIVE ENGAGEMENT* TAHUN 2014-2017**

**Oleh : Suci Fitri Amalia**

*Sucifitriamalia30@gmail.com*

**Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP, M.A.**

***Bibliography : 25 Journals, 14 Books, 2 Thesis, 44 Website***

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The plight of the Rohingya, an ethnic group in Myanmar who has been suffering an institutionalised persecution and discrimination since the administration of military Junta. The Rohingya is facing a serious threat of genocide, ethnic cleansing and crimes against humanity, while the government of Myanmar has failed in its primary duty to protect them as citizen.*

*The sources of this research are obtained through literature review, other books, website, etc. The sources analysis is qualitative methode. This research uses a level analysis of international system, a perspective of constructivism that describes a solution due to the impact of human's thought construction and a concept of constructive engagement as a solution of humanity crisis.*

*Due to such failure, the responsibility to protect them falls on the international community included Indonesian to prevent the occurence of mass atrocities under the Constructive Engagemnet. The objective of this mini thesis are to provide an understanding of the plight of the Rohingya and to analyse the Constructive Engagement as a solution of crisis.*

***Key Words: Constructive Engagement, Rohingya, Indonesia's Policy.***

## Pendahuluan

Dewasa ini ancaman yang muncul terhadap keamanan internasional tidak lagi terpaku pada permasalahan senjata-senjata militer berat yang mematikan atau keamanan tradisional, namun telah berpindah pada permasalahan keamanan non-tradisional seperti ekonomi, lingkungan global, kemiskinan, penyakit seperti HIV/AIDS, kejahatan transnasional, hingga migrasi internasional. Lebih lanjut lagi, persoalan kemanusiaan kerap dipandang bagai dua belah mata pedang karena menyangkut keamanan dan juga etika bagi negara.

Konstelasi politik internasional tahun 2012 masih diwarnai dengan konflik etnis yang melanda beberapa negara. Fenomena yang sedang hangat dibicarakan dan menuai respon dari PBB serta banyak negara adalah konflik etnis yang terjadi di Myanmar, yaitu antara Etnis Rohingya (Muslim) dan Etnis Rakhine (Budha). Permasalahan tentang Muslim Rohingya timbul menyusul konflik sektarian yang terjadi antara etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim dan etnis Rakhine yang mayoritas merupakan penganut Buddha. Akar konflik dari fenomena tersebut masih belum jelas. Sebahagian pengamat menyatakan bahwa konflik tersebut bersumber dari kesenjangan sosial.<sup>1</sup>

Salah satu akar konflik menahun itu adalah status etnis minoritas Rohingya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar tak mengakui dan tak memberi status kewarganegaraan kepada mereka. Sebagai akibat tiadanya kewarganegaraan, etnis Rohingya tak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan,

dan bahkan pekerjaan yang layak. Mereka betul-betul terabaikan dan terpinggirkan.<sup>2</sup>

Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap kelompok Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Akar konflik yang lain adalah adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya. Populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Tentu saja, hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap kerikil dalam sepatu, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini.<sup>3</sup>

Presiden SBY mengatakan, PBB mengharapkan peran Indonesia untuk memelihara komunikasi dengan pimpinan Myanmar guna menindaklanjuti proses demokratisasi di negara tersebut. Indonesia dengan tegas menyatakan siap berkontribusi apapun bahkan jika diminta menjadi “*monitoring mission*”.<sup>4</sup>

Bagi Indonesia isu mengenai Myanmar merupakan hal yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Permasalahan di negara ini telah lama dan berlarut-larut. Konflik yang terjadi di dalam negara Myanmar bukan hanya mengenai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga

---

<sup>1</sup>Abdelkader, E. 2013. The Rohingya Muslims in Myanmar: Past, Present, and Future. *Oregon Review of International Law*, Vol. 15, No. 39 : 401.

---

<sup>2</sup>Alfi Revolusi. 2013. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa UNEJ*: 2.

<sup>3</sup>S. Kundu. 2015. *The Rohingyas: Security Implications for ASEAN and Beyo* New Delhi: IDSA Issue Brief.

<sup>4</sup>Dunia Minta Indonesia Beraksi Untuk Demokrasi di Myanmar. Tersedia di: <http://www.wartaterkini.com/04/13/41/dunia-minta-indonesia-beraksi-untuk-demokrasi-di-myanmar.html> (diakses pada tanggal 20 November 2018)

merupakan gabungan permasalahan kompleks antara permasalahan sosial dan perpecahan etnis. Selain itu penegakan isu HAM di Myanmar juga menjadi prioritas utama bagi Indonesia mengingat banyaknya terjadi pelanggaran HAM di Negara tersebut.<sup>5</sup>

Indonesia bersifat non-intervensi terhadap proses demokratisasi dan penegakan HAM di Myanmar, selama dibawah junta militer. Walaupun negara-negara Barat bertindak secara isolasionis, Indonesia bergerak melalui *constructive engagement*, dimana Indonesia membantu Myanmar memperbaiki situasi politiknya.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “**Peran Indonesia terhadap Krisis Kemanusiaan di Myanmar melalui Kebijakan *Constructive Engagement* Tahun 2014-2017**”.

## KRISIS KEMANUSIAAN DI MYANMAR

Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya adalah pendatang atau imigran gelap yang tidak bisa diakui sebagai warga negara.<sup>7</sup> Menurut pemerintah Myanmar, antara 1826 dan 1948 etnis Rohingya dibawa dari India oleh Inggris

selama pemerintahan kolonial untuk bekerja sebagai petani di perkebunan di Myanmar. Beberapa pihak mengatakan bahwa etnis Rohingya berasal dari Bangladesh dan lainnya mengatakan mereka datang dari negara bagian Rakhine di tenggara Myanmar.<sup>8</sup>

Tidak diakuinya eksistensi etnis Rohingya saat ini berbanding terbalik dengan masa pemerintahan Jenderal U Nu pada tahun 1948-1962. Pada saat kepemimpinan U Nu ada orang dari etnis Rohingya yang masuk dalam pemerintahan seperti Sultan Mahmoud yang menjadi Menteri Kesehatan. Namun setelah kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962, pemerintah Myanmar tidak lagi mengakui etnis Rohingya dengan menganggap bahwa populasi Muslim yang tinggal di Rakhine adalah Bengali atau imigran gelap dari Bangladesh. Selanjutnya, mantan Presiden Myanmar Thein Sein (2011-2016), membantah telah terjadi pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya dan menyebut laporan tersebut adalah fabrikasi atau dibuat-buat.

Thein Sein juga menyangkal bahwa Rohingya adalah imigran gelap dan menyebut mereka sebagai Bengali.<sup>9</sup> Menurutnya, dengan menyebut Rohingya Bengali adalah diskriminatif dan xenophobia.<sup>10</sup> Keyakinan pemerintah atas sejarah bahwa Rohingya bukan etnis

<sup>5</sup>Jalan Panjang Menuju Demokratisasi di Myanmar. Tersedia di:

<<https://m.viva.co.id/berita/dunia/314091-jalan-panjang-myanmar-menuju-demokrasi>>(Diakses pada 20 November 2018)

<sup>6</sup>Wilson Rojeki Sidauruk. 2015. *Peran The Institute for Peace and Democracy (IPD) Dalam Demokratisasi di Myanmar*. Skripsi, Universitas Riau, .

<sup>7</sup>*Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied*, dalam <https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=2589736424>, diakses pada 30 Maret 2019.

<sup>8</sup>Wisnu Dewabrata. *Myanmar Masih Seperti Dulu*, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/08/12/04045530/Myanmar.masih.seperti.dulu>, diakses pada 30 Maret 2019.

<sup>9</sup>Riyan Samutra. *Agar Diakui, Rohingya Harus Ubah Nama* dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141001131507-106-4932/agar-diakui-Rohingya-harus-ubah-nama/>, diakses pada 30 Maret 2019.

<sup>10</sup>Xenophobia adalah ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain, atau yang dianggap asing dalam <http://www.artikata.com/arti-205593-xenophobia.html> diakses pada 30 Maret 2019.

Myanmar berakibat sulitnya etnis Rohingya untuk hidup di Myanmar. Terutama setelah disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang hanya mengakui kelompok etnis yang telah menetap di Myanmar sebelum tahun 1823 di mana etnis Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Sebagaimana ditegaskan oleh pemerintah Myanmar bahwa:

*“...The 1982 citizenship law defines citizen as member of ethnic groups that have settled in Burma before 1823, the start of British Colonial rule in Burma. The Rohingya do not feature among the 135 national races listed by government and therefore rendered stateless.”<sup>11</sup>*

*“In actual fact, although there are (135) national races living in Myanmar today, the so-called Rohingyapeople is not of them. Historically, there has never been a Rohingyarace in Myamar...”<sup>12</sup>*

## **PERAN ASEAN DAN DUNIA INTERNASIONAL TERHADAP KRISIS KEMANUSIAAN DI MYANMAR**

Demi mencegah atau menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sebagaimana yang dialami etnis Rohingya di Myanmar, diperlukan keterlibatan dari negara-negara lain. Keterlibatan ASEAN untuk menangani permasalahan di Myanmar haruslah menggunakan mekanisme ASEAN Way,

yang merupakan prinsip-prinsip khusus negara-negara anggota ASEAN dalam upaya penyelesaian masalah.<sup>13</sup>

Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016, ASEAN baik secara formal maupun nonformal telah beberapa kali menunjukkan usahanya untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Keterlibatan ASEAN dengan menggunakan prinsip ASEAN Way ditunjukkan dengan beberapa kali melakukan pertemuan. Pertemuan-pertemuan ini menjadi area *bargaining* antara negara-negara ASEAN dalam usahanya mengatasi permasalahan yang tengah berlangsung. Contohnya, pada pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada 20 Mei 2015, dilakukan untuk membahas bagaimana langkah lebih lanjut antara ketiga negara tersebut untuk menangani permasalahan “Krisis Manusia Perahu”.<sup>14</sup>

ASEAN juga dapat menjadi instrumen politik luar negeri negara-negara anggotanya. Sebagaimana saat tekanan-tekanan terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan Malaysia atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang menimpa etnis Rohingya. ASEAN dapat menjadi sarana untuk menyalurkan tekanan tersebut. Sebagaimana yang terjadi saat ditutupnya akses bantuan kemanusiaan pada tahun 2016. Presiden Indonesia Joko Widodo bereaksi dengan mengirimkan utusannya yaitu Menlu Retno Marsudi untuk menemui secara langsung Penasihat Negara

<sup>11</sup>Roni Bintang, *Asia's New Boat People*, dalam <http://www.reuters.com/news/picture/asias-new-boat-people?articleId=USRTX1DOG8>, diakses pada 30 Maret 2019.

<sup>12</sup>Myanmar: *The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied* dalam <https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/MYANMAR%20THE%20ROHINGYA%20MINORITY:%20FUNDAMENTAL%20RIGHTS%20DENIED?CMD=VEROBJ&MLKOB=25897364242> diakses pada 30 Maret 2019..

<sup>13</sup> ASEAN Secretariat News. (31 Maret 2019). *ASEAN Heeds Concerns for the Rohingya Tension*. Diambil kembali dari ASEAN: <http://asean.org/asean-heeds-concerns-for-the-rohingya-tension/>

<sup>14</sup>Human Rights Watch. (31 Maret 2019). *Southeast Asia: End Rohingya Boat Pushbacks*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2015/05/14/southeast-asia-end-rohingya-boat-pushbacks>

Myanmar Aung San Suu Kyi. Pertemuan ini menghasilkan diadakannya pertemuan lebih lanjut antara Menteri Luar Negeri ASEAN di Yangon, dan dibukannya kembali pintu bantuan kemanusiaan dari luar negeri.<sup>15</sup>

**KEBIJAKAN *CONSTRUCTIVE*  
ENGAGEMENT INDONESIA  
TERHADAP KRISIS KEMANUSIAAN  
DI MYANMAR DALAM BENTUK  
PARTISIPATIF DAN INKLUSIF**

Sikap pemerintah Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Myanmar yaitu sangat menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi dan melalui kementerian luar negeri, Indonesia berupaya untuk melanjutkan misi-misi diplomatik yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk membantu penyelesaian di Myanmar.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 silam, pemerintah Indonesia akan terus berkontribusi aktif dalam membantu menemukan solusi penyelesaian untuk tragedi kemanusiaan yang telah terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Langkah pertama yang diambil oleh Presiden Joko Widodo yakni menugaskan menteri luar negeri Retno Marsudi untuk menjalankan misi-misi diplomatik.

Melalui kementerian luar negeri Republik Indonesia, pemerintah Indonesia berupaya untuk menggunakan jalur diplomasi dalam membantu mengatasi tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Sehubungan dengan penugasan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi untuk terus

melaksanakan misi diplomatik di Myanmar, pada 6 Desember 2016 menteri luar negeri Retno Marsudi bertolak ke Myanmar. Kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kali ini membawa amanat dari Presiden Joko Widodo untuk membahas solusi penyelesaian konflik di Myanmar.

Langkah diplomasi yakni pendekatan *constructive engagement* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah terbilang tepat mengingat hubungan baik yang dijalin antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Myanmar sudah dimulai sejak Indonesia merdeka. *Constructive engagement* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mulai dari dialog bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi sampai solusi strategis yang disarankan oleh pihak Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Bahkan, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sudah diterima kehadirannya dan diberikan izin untuk masuk ke wilayah Myanmar serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban dari tragedi kemanusiaan di Rakhine. Pemerintah Myanmar menganggap bahwa negara Indonesia sebagai negara netral dan negara kawan.<sup>16</sup>

Berikut ini merupakan program dari kebijakan *constructive engagement* Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar yaitu:

---

<sup>15</sup> Kementerian Luar Negeri. (31 Maret 2019). *Menlu Retno: ASEAN Ambil Aksi Konkret Untuk Kembalikan Stabilitas di Rakhine State*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri RI: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-ASEAN-ambil-aksi-konkret-untuk-kembalikan-stabilitas-di-Rakhine-State.aspx>

---

<sup>16</sup> *Indonesia Urges OIC : Cooperation for Solution to the Myanmar Problem*. (11 September 2017). Diakses pada 26 Januari 2019 dari Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia: <https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Indonesia-Urges-OIC,-Cooperation-for-a-Solution-to-the-Myanmar-Problem.aspx>

## 1. Kebijakan *Constructive Engagement* Indonesia dalam bentuk Partisipatif

Badan bentukan pemerintah Indonesia yakni Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM), menjadi salah satu alat penghubung bagi Indonesia untuk membantu mengatasi permasalahan yang menimpa masyarakat etnis Rohingya di Myanmar. Melalui arahan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, AKIM melakukan tindakan pendekatan terhadap masyarakat Myanmar dan melakukan berbagai dialog untuk lebih mengetahui permasalahan yang telah terjadi serta solusi yang dapat diberikan secara tepat tanpa menimbulkan berbagai pertengkaran ataupun kecaman oleh beberapa pihak. Pendekatan yang dilakukan oleh anggota-anggota AKIM melalui pendekatan kemanusiaan dengan target 4 isu dasar yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan *humanitarian relief* (pemenuhan kebutuhan dasar).<sup>17</sup>

Dalam program ini, sebanyak 11 organisasi sosial kemasyarakatan yang berkomitmen untuk memberikan bantuan di bidang peningkatan kapasitas pengiriman tenaga ahli, penghidupan, dan pemulihan. Sampai saat ini Indonesiatelah memberikan bantuan berupa empat sekolah senilai USD 1 juta di komunitas Muslim dan Buddha di Rakhine yang diresmikan pada tahun 2014, lalu 10 kontainer berisi makanan dan pakaian yang diluncurkan oleh Presiden RI pada Desember 2016, serta dua sekolah di Sittwe, Rakhine yang diresmikan pada bulan Januari 2017.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>RI Kirimkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Rohingya. (2017, September). Diakses pada 26 Januari 2019, dari BBC Indonesia: [www.bbc.com](http://www.bbc.com)

<sup>18</sup>Kemlu-AKIM Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan untuk Rakhine <https://jpp.go.id/peristiwa/internasional/310277-kemlu-akim-luncurkan-program->

Direktur Eksekutif *Human Rights Working Group* (HRWG) memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen. Di sisi yang lain, kerjasama militer yang telah dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah Negara lain juga harus menjadi saluran diplomasi untuk menekan militer Myanmar menghentikan serangan dan kekerasan kepada Rohingya<sup>19</sup>.

Di level Indonesia, pemerintah Indonesia yang bisa meyakinkan Myanmar untuk terlibat dalam Informal Indonesia Foreign Ministers Retreat di Myanmar pada 18 Desember 2016 yang lalu dan merupakan langkah awal bagi Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan diplomasi yang lebih efektif, dengan mengajak negara-negara di luar Indonesia, eksekutif, legislatif, maupun militer, untuk mencegah terjadinya kekerasan baru.

HRWG memandang bahwa terdapat friksi yang cukup kuat di dalam pemerintahan di Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut. Untuk itu pula, upaya inisiasi yang pantas dilakukan harus mengarah pada keterlibatan oleh semua pihak.

## 2. Kebijakan *Constructive Engagement* Indonesia dalam bentuk Inklusif

Pimpinan majelis Budha Indonesia mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan bantuan, perlindungan dan hak asasi dasar kepada masyarakat Rakhine

---

bantuankemanusiaan-untuk-rakhine diakses tanggal 9 Februari 2019.

<sup>19</sup> Kristian Erdianto. 2017. *HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer* diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/13014421/hrwg-inisiatif-aung-san-suu-kyi-terkait-rohingya-tak-direspons-militer> pada 9 Februari 2019.

terkait terjadinya krisis kemanusiaan dan tidak terkait dengan agama. Pimpinan majelis Budha Indonesia juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya tidak terprovokasi untuk menyebarkan kebencian dan menyaring semua informasi yang beredar di media sosial. Selain itu, pimpinan majelis budha Indonesia meminta kepada pihak *cyber crime* Polri dan Badan Intelijen negara untuk mendeteksi informasi yang berbentuk provokasi supaya tidak menyebar ke masyarakat.<sup>20</sup>

Pemimpin organisasi Budha Myanmar (Ma Ba Tha) menganggap bahwa umat Budha adalah korban amukan orang islam dan permusuhan kepada para jurnalis adalah sifat universal pada gerakan garis keras kaum nasionalis. Mereka mengedepankan chauvirisme dan memperjuangkan untuk melawan invasi Islam di tanah umat Budha Myanmar.<sup>21</sup>

Dalam mendukung rekonsiliasi konflik adalah dengan membangun opini luas untuk membangun perdamaian dan tanggung jawab bersama tanpa terlibat untuk masuk terlalu dalam, apalagi memihak salah satu pihak sesama negara Indonesia. Dalam menangani krisis Rohingya, Indonesia begitu yakin dengan jalan diplomasi kemanusiaan akan membawa perubahan yang lebih baik karena akan menjadikan Rohingya sebagai persoalan bersama, tanpa harus menimbulkan masalah baru.

## KESIMPULAN

Kasus pelanggaran HAM di wilayah Asia Tenggara sudah sepatutnya para pemimpin di Indonesia memikirkan suatu kelonggaran atau fleksibilitas untuk memandang atau menerapkan dan menjalankan prinsip ini, tidak kaku seperti di awal pembentukan Indonesia. Setidaknya memberikan ruang gerak bagi penegakhukum khususnya bidang HAM untuk memberikan rekomendasi atau masukkan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara anggota Indonesia telah menyimpang dari prinsip-prinsip kemanusiaan dunia internasional.

Dengan begitu memberikan efek jera bagi setiap negara anggota yang semena-mena terhadap pelanggaran kemanusiaan dan hal ini sudah menjadi suatu bagian yang harus dilakukan oleh setiap suatu negara di dunia internasional khususnya dalam hubungan internasional dan Hukum Internasional.

Sejarah terbentuknya *constructive engagement* Indonesiasangat memiliki peran yang sangat luar biasa dalam menjaga keutuhan suatu etnis dalam suatu negara anggota Indonesia. Akan tetapi hal ini harus dipikirkan oleh para pemegang kekuasaan negara untuk memikirkan lebih lanjut tentang tindakan kemanusiaan. *Constructive Engagement* Indonesia mengedepankan prinsip kemanusiaan yang bertujuan untukmenciptakan suatu demokratisasi di Myanmar yang sedang dilanda musibah dan hal ini sesuai dengan cita-cita yang telah dituangkan dalam Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

---

<sup>20</sup>[www.nasional.tempo.com](http://www.nasional.tempo.com), diakses 10 Februari 2019.

<sup>21</sup>Maung Tha Hla. "*Rohingya, Buddhist Rakhaing Cultural Association*". New York Human Right Watch, crimes against humanity and ethnic cleansing of Rohingya Muslim in Burma's Arakan State.

## DAFTAR PUSTAKA

Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.

### Jurnal

E, Abdelkader. 2013. The Rohingya Muslims in Myanmar: Past, Present, and Future. *Oregon Review of International Law*, Vol. 15, No. 393.

Marelda, Santa. 2011. Responsibility to Protect: Suatu Tanggung Jawab dalam Kedaulatan Negara. *Jurnal Hubungan Internasional* .Vol 2. No.1.

Revolusi, Alfi. 2013. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa UNEJ*.

Tha Hla, Maung. "Rohingya, Buddhist Rakhaing Cultural Association". *New York Human Right Watch, crimes against humanity and ethnic cleansing of Rohingya Muslim in Burma's Arakan State*.

### Buku

Holsti, K.J. 1970. "National Role Conception in the study of Foreign Policy," *International Studies Quarterly*.

Jackson, Robert dan George Sorensen. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan* Terjemahan Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kerlinger, Fred N. 2000. *Asas-Asas Penelitian Behavior* (eds. 3).

Kundu, S. 2015. *The Rohingyas: Security Implications for ASEAN and Beyond*. 2015. New Delhi: IDSA Issue Brief.

Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1990.

### Website

RI Kirimkan Bantuan Kemanusiaan Untuk Rohingya. (2017, September). Diakses pada 26 Januari 2019, dari BBC Indonesia: [www.bbc.com](http://www.bbc.com)

Kemlu-AKIM Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan untuk Rakhine <https://jpp.go.id/peristiwa/internasional/310277-kemlu-akim-luncurkan-program-bantuankemanusiaan-untuk-rakhine> diakses tanggal 9 Februari 2019.

Kristian Erdianto. 2017. *HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer* diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/05/13014421/hrwg-inisiatif-aung-san-suu-kyi-terkait-rohingya-tak-direspons-militer> pada 9 Februari 2019.

Kementerian Luar Negeri. (31 Maret 2019). *Menlu Retno: ASEAN Ambil Aksi Konkret Untuk Kembalikan Stabilitas di Rakhine State*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri RI: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-ASEAN-ambil-aksi-konkret-untuk-kembalikan-stabilitas-di-Rakhine-State.aspx>

*Indonesia Urges OIC : Cooperation for Solution to the Myanmar Problem.* (11 September 2017). Diakses pada 26 Januari 2019 dari Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia:  
<https://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/Indonesia-Urges-OIC,-Cooperation-for-a-Solution-to-the-Myanmar-Problem.aspx>